

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesejahteraan publik merupakan dorongan utama dari lahirnya otonomi daerah. Tantangannya adalah bagaimana mentransformasikan makna tersebut ke dalam langkah-langkah nyata dalam bentuk kebijakan yang dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi (Kurniawan *et al.*, 2017). Di sinilah, pemerintah daerah harus mampu menggunakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Kesanggupan daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan teknologi informasi berdampak pada sejumlah inovasi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pelayanan publik di suatu daerah (Ikhbaluddin, 2020).

Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), termasuk Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Mojokerto telah beralih ke SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Perubahan ini dilakukan untuk menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta efektif melalui interkoneksi atau integrasi layanan informasi pemerintah daerah. Sistem yang disebut SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) mengubah data pembangunan daerah menjadi laporan dan sumber data yang mampu diakses oleh publik secara luas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian masyarakat.

Berdasarkan arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang telah menetapkan SIPD sebagai aplikasi pemerintahan. Tujuan dari aplikasi web ini adalah untuk meningkatkan dan mempercepat Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelayanan publik. Namun, untuk menjalankan program SIPD ini tidaklah sederhana, diperlukan ketekunan dan kerjasama dari masing-masing instansi terkait. Dalam penelitian Wurara *et al.*, (2020) memberitahukan bahwa masih terdapat keterlambatan dalam input dari masing-masing instansi yang diharuskan untuk menginput data perencanaan.

Pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pemerintahan daerah lainnya yang saling terintegrasi merupakan cakupan dari SIPD (Fahrul, 2023) . Sebelum adanya SIPD Bappeda Kabupaten Mojokerto menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) di tahun 2020. Meskipun SIMDA masih bisa digunakan sebagai sebuah sistem informasi dalam penyajian manajemen pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi SIMDA tidak terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah serta sistem pemerintahan daerah lainnya, sehingga untuk melaksanakan proses ke SIMDA dari SIPD perlu bekerja dua kali. Perkembangan yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2022 adalah SIPD-RI yang kemudian akan diimplementasikan pada tahun 2024. SIPD-RI sendiri adalah modifikasi dari SIPD (Wibowo *et al.*, 2023).

Efektifitas pengelolaan keuangan daerah secara langsung mempengaruhi pencapaian otonomi daerah dan memberikan peran penting terhadap tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih baik (Fajarudin, 2021). Dengan adanya SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) ini diharapkan tata kelola pemerintahan

yang baik dapat terwujud. SIPD mengumpulkan data dengan cepat dan benar dengan menggunakan teknologi dan sistem informasi yang kompleks sehingga sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perencanaan program kegiatan dan menilai pertumbuhan daerah secara akurat, efektif, dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu kegiatan dan perencanaan program serta menganalisis pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan rasional. Pusat regional menggunakan SIPD sebagai jaringan untuk mengumpulkan data secara terintegrasi, *real time*, dan online sehingga memungkinkan perencanaan kegiatan program dan evaluasi pembangunan daerah yang obyektif. Selain itu, setiap organisasi dalam pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memfasilitasi integrasi pemanfaatan data yang berhubungan dengan kemajuan pembangunan. Wurara *et al.*, (2020).

Adapun penelitian yang membahas mengenai kendala pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada penerapan SIPD seperti yang dilakukan oleh Nasution (2021), Saputra (2020), Wibowo *et al.*, (2023), Karundeng *et al.*, (2021) dan Wurara *et al.*, (2020). Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Wibowo *et al.*, (2023) menyatakan bahwa penatausahaan keuangan masih banyak hambatan dan kendala sehingga pelaksanaan dan penatausahaan keuangan tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga bisa melaksanakan tiga pilar pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Implementasi SIPD penatausahaan pada Bappeda Kabupaten Mojokerto masih belum optimal dalam penerapannya pada tahap pengelolaan keuangan daerah

yang sejalan dengan peraturan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ada beberapa perbedaan pemahaman dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah apakah wajib menerapkan SIPD atau SIMDA.

Peneliti memilih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto menjadi objek penelitian karena Bappeda Kabupaten Mojokerto telah menggunakan SIPD sejak tahun 2021 namun masih terbatas pada penganggaran saja. Pada tahun 2022 bidang penatausahaan mulai menggunakan SIPD akan tetapi masih di *back up* dengan SIMDA keuangan. Pada tahun 2023 bidang penatausahaan menjalankan dua aplikasi dalam proses penatausahaan yaitu SIPD dan juga FMIS (*Financial Management Information System*) yang merupakan pengembangan dari SIMDA keuangan. Aplikasi SIMDA FMIS merupakan rancangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dirancang, dikembangkan dan digunakan dalam melakukan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja (Ghaffar, 2016). Peneliti tidak memilih beberapa instansi pemerintah lainnya sebagai objek penelitian karena ada beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Mojokerto masih belum menerapkan SIPD.

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto” mengingat ada beberapa penelitian yang membahas terkait pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang didukung dengan SIPD, akan tetapi pada penelitian ini akan menjelaskan secara rinci setiap hambatan

yang dihadapi Bappeda Kabupaten Mojokerto dalam penggunaan SIPD dari setiap indikator tingkat efektivitas.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan latar belakang yang telah disusun, maka perumusan masalah yang terdapat dalam latar belakang yaitu bagaimanakah efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah di Bappeda Kabupaten Mojokerto?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah pencapaian dalam sebuah penelitian, dan setiap penelitian harus memiliki arah dan tujuan yang pasti. Penelitian tidak akan berlangsung dan memberikan hasil yang diinginkan kecuali mempunyai tujuan dan arah yang jelas. Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah di Bappeda Kabupaten Mojokerto.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan kajian dari penelitian terdahulu, penelitian mengenai SIPD Kabupaten Mojokerto khususnya dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah masih belum ada, sehingga dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dengan menghasilkan analisis terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Mojokerto. Hasil dari Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pemerintahan, terutama ilmu yang berkaitan dengan sistem informasi

pemerintahan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan subjek tersebut.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang diperoleh oleh peneliti. Selain itu hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai bahan tinjauan untuk memperbaiki sistem informasi sehingga menambah efektivitas pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan oleh pemerintah daerah lain yang menghadapi permasalahan yang sama.